



## Teori Pembangunan dalam Perspektif Ibnu Khaldun: Analisis Historis dan Implikasi Kontemporer

Ade Suryawirawan<sup>1\*</sup>, Yadi Janwari<sup>2</sup>, Dedah Jubaedah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sindang Kasih, Indonesia

<sup>2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

E-mail: [adesuryawirawan@uskm.ac.id](mailto:adesuryawirawan@uskm.ac.id)<sup>1</sup>, [yadijanwari@uinsgd.ac.id](mailto:yadijanwari@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [dedahjubaedah@uinsgd.ac.id](mailto:dedahjubaedah@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

\*Korespondensi penulis: [adesuryawirawan@uskm.ac.id](mailto:adesuryawirawan@uskm.ac.id)

**Abstract.** *Ibn Khaldun's thoughts, especially those presented in his work *Muqaddimah*, have made important contributions to understanding the dynamics of society, economy, and politics. This article comprehensively examines Ibn Khaldun's development theory with a historical approach, conceptual analysis, and reflection on the relevance of his thoughts in the modern era. Using literature study and content analysis methods, this study explores central concepts such as *asabiyyah*, dynasty cycle, economic productivity, and the role of the state in development. The findings show that although issued in the 14th century, Ibn Khaldun's development theory has essential similarities with contemporary development paradigms such as the importance of social capital, fiscal balance, and leadership regeneration. The theoretical implications of this study are expected to enrich the discourse on development based on ethical values and social justice.*

**Keywords:** *Asabiyyah, Development Theory, Dynasty Cycle, Economy, Ibn Khaldun.*

**Abstrak.** Pemikiran Ibnu Khaldun, terutama yang tersaji dalam karyanya *Muqaddimah*, telah memberi kontribusi penting dalam memahami dinamika masyarakat, ekonomi, dan politik. Artikel ini mengkaji secara komprehensif teori pembangunan menurut Ibnu Khaldun dengan pendekatan historis, analisis konsep, dan refleksi terhadap relevansi pemikirannya di era modern. Menggunakan metode studi pustaka dan analisis isi, penelitian ini menggali konsep sentral seperti *asabiyyah*, siklus dinasti, produktivitas ekonomi, dan peran negara dalam pembangunan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun dikeluarkan pada abad ke-14, teori pembangunan Ibnu Khaldun memiliki kesamaan esensial dengan paradigma pembangunan kontemporer seperti pentingnya modal sosial, keseimbangan fiskal, dan regenerasi kepemimpinan. Implikasi teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana pembangunan berbasis nilai-nilai etika dan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** *Asabiyyah, Ekonomi, Ibnu Khaldun, Siklus Dinasti, Teori Pembangunan.*

### 1. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai konsep dan strategi pembangunan telah menjadi tema sentral dalam kajian ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik sejak era modern. Paradigma pembangunan Barat, mulai dari teori modernisasi hingga pendekatan sistem dunia, banyak menekankan pada aspek material dan mekanistik (Putnam, 2000). Di sisi lain, pemikiran peradaban Islam telah menunjukkan alternatif yang holistik dan multidimensional dalam menilai dinamika masyarakat. Salah satu pemikir terkemuka dalam tradisi ini adalah Ibnu Khaldun, yang melalui karya monumentalnya *Muqaddimah* menguraikan bagaimana integrasi antara dimensi sosial, ekonomi, politik, dan spiritual mendasari pembangunan peradaban.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam teori pembangunan menurut Ibnu Khaldun, menelaah komponen utamanya, dan mengaitkan antara pemikirannya dengan

tantangan pembangunan kontemporer. Dengan demikian, diharapkan pemikiran Ibnu Khaldun dapat memberikan perspektif alternatif yang berharga bagi upaya pembangunan yang berkelanjutan dan etis.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh melalui telaah literatur dari karya primer seperti *Muqaddimah* (Ibnu Khaldun, 1967) dan sejumlah sumber sekunder yang menelaah pemikiran Ibnu Khaldun, termasuk analisis sejarah, sosiologi, dan ekonomi (Spengler, 1964; Chapra, 2000; Alatas, 2006). Teknik analisis isi digunakan untuk mengekstrak tema-tema kunci dalam teori pembangunan Ibnu Khaldun dan untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep-konsep tersebut dengan teori pembangunan modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi kritis terhadap relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks zaman kontemporer.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **Konteks Sejarah dan Biografi Singkat**

Ibnu Khaldun (1332–1406 M) lahir di Tunisia dan tumbuh dalam lingkungan intelektual yang dinamis di wilayah Maghrib dan Andalusia. Pengalamannya sebagai pejabat pemerintahan dan pengamat sosial memberinya wawasan mendalam tentang dinamika kekuasaan, kemerosotan moral, dan perubahan struktural dalam masyarakat. Karya *Muqaddimah* tidak hanya berfungsi sebagai pendahulu sejarah, tetapi juga sebagai sebuah kajian sistematis mengenai bagaimana peradaban terbentuk, berkembang, dan akhirnya runtuh (Ibnu Khaldun, 1967). Dengan menyatukan analisis sejarah, ekonomi, dan sosiologis, Ibnu Khaldun menolak pendekatan naratif semata dan menawarkan kerangka analitis yang bersifat kausal, menjadikannya pelopor ilmu sosial.

### **Konsep-Konsep Inti dalam *Muqaddimah***

Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengemukakan beberapa konsep kunci yang menjadi dasar teori pembangunannya, antara lain:

- Asabiyyah: Solidaritas atau kohesi kelompok yang menjadi kekuatan penggerak peradaban.
- Siklus Dinasti: Teori mengenai kelahiran, kemunculan, kemakmuran, dan kejatuhan dinasti secara berurutan.

- Produktivitas Ekonomi: Peran utama kerja dan kegiatan ekonomi dalam membentuk kesejahteraan suatu masyarakat.
- Peran Negara: Fungsi negara sebagai penjamin hukum, keamanan, dan keadilan sosial.

Konsep-konsep ini tidak hanya relevan pada masanya tetapi juga memiliki kemiripan dengan teori pembangunan modern yang mengedepankan aspek non-material, seperti modal sosial, dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan (Putnam, 2000).

### **Konsep Pembangunan Menurut Ibnu Khaldun**

#### **Asabiyyah: Solidaritas Sosial sebagai Fondasi Pembangunan**

Konsep *asabiyyah* merujuk pada kekuatan solidaritas internal dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, *asabiyyah* muncul ketika masyarakat hidup dalam kondisi sederhana dan bersifat kolektif, sehingga menciptakan kesatuan dan kekompakan dalam menghadapi tantangan eksternal (Ibnu Khaldun, 1967). Solidaritas ini memungkinkan kelompok tersebut untuk mengatasi kesulitan dan mendirikan sistem pemerintahan yang kokoh.

Dalam konteks pembangunan, *asabiyyah* dapat disandingkan dengan konsep modal sosial yang diuraikan oleh Putnam (2000), di mana kepercayaan dan kerja sama antarwarga menjadi aset penting bagi kemajuan masyarakat. Namun, Ibnu Khaldun juga mengamati bahwa kekuatan *asabiyyah* bersifat siklis. Saat kelompok yang awalnya bersatu berhasil merebut kekuasaan dan mengalami kemakmuran, kemewahan dan individualisme mulai merusak kohesi tersebut, sehingga memicu penurunan kualitas pemerintahan dan akhirnya kehancuran dinasti.

#### **Siklus Dinasti: Dinamika Naik Turun Peradaban**

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa peradaban selalu melalui siklus dinasti yang meliputi lima tahap, yaitu:

- 1) Pendirian: Munculnya *asabiyyah* yang kuat dan semangat kolektif.
- 2) Konsolidasi: Stabilitas politik dan terbentuknya struktur administratif.
- 3) Puncak Kemakmuran: Masa kejayaan, di mana kemajuan ekonomi dan sosial terwujud.
- 4) Dekadensi: Penurunan moral dan meningkatnya kemewahan yang mengikis solidaritas.
- 5) Kehancuran: Runtuhnya sistem pemerintahan yang menyebabkan kejatuhan peradaban (Ibnu Khaldun, 1967).

Siklus ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diartikan sebagai suatu kondisi statis, melainkan sebagai dinamika yang terus berubah seiring waktu.

Fenomena serupa juga telah diamati dalam studi-studi modern mengenai siklus politik dan ekonomi, di mana pertumbuhan dan krisis selalu berlangsung secara bergantian (Spengler, 1964).

### **Ekonomi dan Produktivitas: Kekuatan Pendorong Pembangunan**

Ibnu Khaldun menekankan bahwa aktivitas ekonomi—terutama kerja, perdagangan, dan pertanian—merupakan pilar utama yang menopang sebuah peradaban. Ia berpendapat bahwa kekayaan suatu negara bukan berasal dari harta yang diperoleh secara pasif, melainkan dari produktivitas kerja masyarakat (Ibnu Khaldun, 1967). Dalam hal ini, tekanan pajak yang berlebihan dipandang sebagai penghambat semangat kerja dan inovasi, yang pada akhirnya merusak fondasi ekonomi.

Pemikiran ini memiliki paralel yang kuat dengan teori-teori modern tentang dorongan ekonomi. Misalnya, hubungan antara beban pajak dengan motivasi kerja dan investasi telah dibahas dalam konteks kurva Laffer, yang menyatakan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru mengurangi penerimaan negara karena menekan aktivitas ekonomi (Chapra, 2000).

### **Peran Negara dan Pemerintahan**

Bagi Ibnu Khaldun, negara berperan sebagai penjaga keadilan, penjamin keamanan, dan pengatur kehidupan sosial. Negara harus menciptakan iklim politik yang stabil dan sistem hukum yang adil untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga keberlangsungan solidaritas (Ibnu Khaldun, 1967). Pemerintahan yang efektif harus menghindari praktik korupsi dan birokrasi yang berlebihan, karena kedua hal ini dapat mempercepat penurunan moralitas dan menghancurkan fondasi *asabiyyah*.

Dalam konteks modern, peran negara sebagai fasilitator pembangunan juga diakui secara luas. Negara yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas terbukti mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial (Alatas, 2006).

### **Ekonomi, Kerja, dan Produksi**

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pembangunan berakar dari kerja (*amal*), produksi, dan perdagangan. Ia menyatakan bahwa kemakmuran negara tergantung pada produktivitas warganya. Ia juga mengkritik sistem perpajakan yang berlebihan karena akan mengurangi insentif untuk bekerja dan menciptakan kemunduran ekonomi (Chapra, 2000; Rosenthal, 1958). Pemikiran ini menjadi dasar awal bagi ekonomi pembangunan Islam modern.

## **Perbandingan dengan Teori Pembangunan Kontemporer**

### **Modal Sosial dan Solidaritas**

Konsep *asabiyyah* Ibnu Khaldun mirip dengan konsep modal sosial yang diusung oleh para sosiolog modern. Menurut Putnam (2000), modal sosial—berupa jaringan, kepercayaan, dan norma-norma bersama—merupakan landasan penting bagi keberhasilan pembangunan suatu masyarakat. Kedua konsep tersebut menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh kekuatan solidaritas sosial dan kerjasama komunitas.

### **Siklus Ekonomi dan Politik**

Dalam kerangka pembangunan modern, dinamika politik dan ekonomi sering kali dijelaskan melalui model siklus bisnis dan siklus politik. Teori siklus dinasti Ibnu Khaldun, yang menekankan transisi dari masa pendirian hingga fase dekadensi, memberikan analogi penting untuk fenomena pertumbuhan dan krisis yang berulang dalam perekonomian suatu negara (Spengler, 1964). Pendekatan ini mengindikasikan bahwa peran regenerasi kepemimpinan dan reformasi struktural sangatlah esensial dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

### **Ekonomi Fiskal dan Kebijakan Pajak**

Pandangan Ibnu Khaldun mengenai pentingnya produktivitas dan batasan pada pemungutan pajak berlebihan memiliki kemiripan dengan analisis ekonomi modern. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif investasi dan produktivitas, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Chapra, 2000). Pandangan ini mendorong kebijakan fiskal yang seimbang antara pengumpulan pendapatan negara dan pemeliharaan semangat produktif masyarakat.

### **Kritik terhadap Pembangunan Materialistis**

Salah satu kontribusi terbesar Ibnu Khaldun adalah kritiknya terhadap pandangan pembangunan yang terlalu materialistis. Pemikiran beliau menempatkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai faktor penentu dalam keberlangsungan peradaban. Kritik ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat terkadang mengorbankan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan (Alatas, 2006). Perbandingan ini menegaskan bahwa paradigma pembangunan yang holistik—yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai-nilai etika dan sosial—merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan.

## **Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun untuk Pembangunan Kontemporer**

### **Kebijakan Publik Berbasis Modal Sosial**

Implementasi konsep *asabiyyah* dalam kebijakan pembangunan dapat memunculkan strategi yang menekankan penguatan jejaring sosial dan partisipasi masyarakat. Upaya membangun kepercayaan antarwarga dan meningkatkan solidaritas, misalnya melalui program pemberdayaan komunitas, dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan (Putnam, 2000).

### **Reformasi Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Berdasarkan analisis Ibnu Khaldun, reformasi birokrasi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi kunci untuk mencegah fase dekadensi dinasti yang disebabkan oleh korupsi dan kemewahan (Ibnu Khaldun, 1967). Modernisasi sektor publik dengan penerapan teknologi informasi dan sistem tata kelola yang modern dapat membantu meminimalkan inefisiensi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

### **Strategi Ekonomi yang Berorientasi pada Produktivitas**

Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tidak memberatkan produktivitas masyarakat. Pendekatan kebijakan yang mengutamakan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong inovasi (Chapra, 2000). Selain itu, insentif bagi sektor riil dan dukungan terhadap UMKM dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

### **Pendekatan Holistik dalam Perencanaan Pembangunan**

Integrasi antara faktor material dan non-material menjadi kunci dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan. Memasukkan nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan kepemimpinan yang visioner dalam kerangka perencanaan pembangunan dapat mengantisipasi krisis moral yang sering kali muncul akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (Alatas, 2006). Oleh karena itu, perumusan strategi pembangunan harus memadukan perspektif ekonomi dengan aspek sosial dan budaya, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis antara pertumbuhan dan kemanusiaan.

## **Diskusi dan Analisis Kritis**

### **Kekuatan Teoretis dan Kontribusi Intelektual**

Pemikiran Ibnu Khaldun menawarkan kekayaan teoretis yang tidak hanya bersifat historis, tetapi juga relevan untuk analisis kontemporer. Dengan mengintegrasikan unsur solidaritas sosial (*asabiyyah*), dinamika siklus politik, dan pentingnya produktivitas ekonomi, beliau telah menyediakan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai perkembangan peradaban. Kontribusi intelektual ini mendorong para peneliti dan praktisi pembangunan untuk melihat keberhasilan suatu masyarakat dari perspektif holistik, yang tidak hanya mengukur kemajuan dari aspek ekonomi tetapi juga dari kualitas hubungan sosial dan etika kepemimpinan.

### **Batasan dan Kritikan terhadap Pemikiran Ibnu Khaldun**

Meski pemikiran Ibnu Khaldun memiliki kekuatan konseptual yang mendalam, ada pula beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, model siklus dinasti yang diusulkan cenderung bersifat deterministik dan tidak memperhitungkan faktor eksternal seperti inovasi teknologi atau pengaruh global yang kini menjadi bagian penting dalam dinamika pembangunan. Kedua, penerapan konsep *asabiyyah* dalam masyarakat modern harus disesuaikan dengan kompleksitas struktur sosial kontemporer yang jauh lebih heterogen dibandingkan masyarakat abad pertengahan (Spengler, 1964).

### **Relevansi dalam Konteks Globalisasi dan Digitalisasi**

Transformasi ekonomi dan politik yang didorong oleh globalisasi dan digitalisasi menuntut adanya adaptasi terhadap teori-teori klasik. Meskipun demikian, aspek fundamental dari pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan, terutama dalam menjaga integritas sosial dan etika dalam menghadapi arus modernisasi. Solidaritas, kepercayaan, dan partisipasi aktif dalam komunitas—konsep yang diwakili oleh *asabiyyah*—merupakan elemen esensial yang dapat dijadikan dasar dalam merancang masyarakat digital yang inklusif dan berkelanjutan (Putnam, 2000).

### **Potensi Aplikasi dalam Kebijakan Pembangunan Nasional**

Implikasi praktis dari pemikiran Ibnu Khaldun dapat terlihat dalam kebijakan pembangunan nasional yang mengutamakan pembangunan berbasis nilai dan partisipasi masyarakat. Misalnya, program desentralisasi dan pemberdayaan daerah dapat menjadi wujud aplikasi dari prinsip regenerasi kepemimpinan dan penguatan kohesi sosial. Demikian pula,

reformasi sektor publik yang mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dianjurkan oleh Ibnu Khaldun (Ibnu Khaldun, 1967).

### **Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi**

#### **Penguatan Modal Sosial dalam Pembangunan**

Mendorong partisipasi masyarakat melalui program-program pemberdayaan komunitas dan pengembangan jejaring sosial perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan. Hal ini dapat diwujudkan melalui:

- Program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, dan kepedulian sosial.
- Kegiatan sosial yang mengedepankan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
- Peningkatan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional (Putnam, 2000).

#### **Reformasi Kebijakan Fiskal**

Untuk mendukung produktivitas ekonomi dan menghindari hambatan birokrasi, pemerintah dianjurkan untuk:

- Meninjau kembali kebijakan perpajakan agar tidak membebani sektor produktif.
- Menyediakan insentif fiskal bagi sektor usaha yang berorientasi inovasi dan peningkatan kapasitas produksi.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pajak dan pelayanan publik (Chapra, 2000).

#### **Pengembangan Kepemimpinan dan Regenerasi Politik**

Kepemimpinan yang visioner dan etis sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas pembangunan. Rekomendasi ini mencakup:

- Program pelatihan kepemimpinan untuk pejabat publik dan calon pemimpin generasi muda.
- Pembentukan lembaga pengawasan independen untuk memonitor kinerja pemerintah dan mencegah praktik korupsi.
- Penerapan kebijakan regenerasi politik secara berkala guna memastikan munculnya ide-ide baru yang adaptif terhadap perubahan zaman (Ibnu Khaldun, 1967).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran Ibnu Khaldun menawarkan kerangka teoritis yang komprehensif dalam memahami mekanisme pembangunan peradaban. Dengan menempatkan solidaritas sosial (*asabiyyah*), siklus dinasti, produktivitas ekonomi, dan peran negara sebagai inti analisisnya, Ibnu Khaldun telah menyediakan dasar filosofis dan empiris yang mendahului banyak teori modern. Walaupun dihadapkan pada tantangan globalisasi dan kompleksitas sosial kontemporer, relevansi pemikiran beliau tetap kuat dalam mendorong paradigma pembangunan yang holistik, inklusif, dan beretika.

Implikasi teoritis dan praktis dari kajian ini membuka peluang bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hubungan sosial dan nilai moral. Ke depan, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengintegrasikan pemikiran klasik ini dengan inovasi kontemporer guna membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Kajian terhadap teori pembangunan Ibnu Khaldun perlu terus dikembangkan dalam konteks kontemporer, khususnya pada negara-negara Muslim yang tengah menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan warisan pemikiran klasik ini dengan instrumen pembangunan modern, seperti tata kelola yang baik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta reformasi kebijakan fiskal dan pendidikan. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk menguji relevansi empiris gagasan Ibnu Khaldun terhadap indikator-indikator pembangunan dewasa ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. F. (2006). *Applying Ibn Khaldun: The recovery of a lost tradition in sociology*. Islamic Book Trust.
- Alatas, S. H. (2006). *Ibnu Khaldun dan ilmu sosial Muslim*. LP3ES.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Muslim contribution to economic thought*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? *The Journal of Socio-Economics*, 37(2), 836–863. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2006.12.051>
- Hosseini, H. S. (2003). Contributions of medieval Muslim scholars to the history of economics and their impact: A refutation of the Schumpeterian great gap. *History of Political Economy*, 35(2), 361–392.

- Ibnu Khaldun. (1967). *Muqaddimah* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.
- Issawi, C. (1967). *The economic history of the Middle East, 1800–1914*. University of Chicago Press.
- Lacoste, Y. (1984). *Ibn Khaldun: Birth of history and the past of the Third World*. Verso.
- Mahdi, M. (2006). *Ibn Khaldun's philosophy of history: A study in the philosophic foundation of the science of culture*. University of Chicago Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rosenthal, F. (Trans.). (1958). *The Muqaddimah: An introduction to history by Ibn Khaldun*. Princeton University Press.
- Spengler, J. J. (1964). Economic thought of Islam: Ibn Khaldun. *Comparative Studies in Society and History*, 6(3), 268–306.
- Toynbee, A. J. (1935). *A study of history*. Oxford University Press.